

CATUSPATHA KONSEP, TRANSFORMASI, DAN PERUBAHAN

Oleh :

I Gusti Made Putra

Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana
Email: madeputra@dps.centrin.net.id

ABSTRAK

Catuspatha di Bali diartikan bukan sekedar simpang empat atau pempatan tetapi suatu simpang empat (crossroads) yang memiliki nilai sakral dan makna tersendiri dan disepadankan dengan pempatan agung. Di zaman kerajaan di Bali catuspatha sebagai pusat ibukota kerajaan dan berarti catuspatha adalah pusat negara. Sementara itu sejak pendudukan Belanda di di Bali, ada kecendrungan untuk menempatkan elemen-elemen estetika sebagai focal point atau landmark suatu kota pada pusat suatu catuspatha dan kecendrungan ini dilanjutkan oleh pemerintah republik pada masa kemerdekaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap konsep catuspatha, transformasi konsep, perubahan-perubahan ekspresi catuspatha pusat kerajaan dari masa kerajaan ke masa republik dan dampak perubahan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan melakukan observasi terhadap 9 (sembilan) catuspatha warisan masa kerajaan di wilayah Bali, penelitian dokumen, rekonstruksi melalui wawancara analisis di lapangan, wawancara terhadap para sulinggih dari unsur-unsur pendeta siwa, budha, bujangga, dan unsur lainnya serta dilakukan pula penelaahan tekstual berupa literatur, hasil penelitian, dan babad

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi perubahan gagasan dimana pandangan tentang pusat catuspatha yang kosong berubah menjadi elemen estetika kota yang disamping berperan sebagai rambu-rambu lalu lintas juga sebagai orientasi. Dalam konteks politik, terjadi dampak terhadap keutuhan nilai-nilai tradisi dalam catuspatha dimana simbol-simbol kekuasaan kerajaan yang terekspresi dalam tatanan puri dengan fasilitas pusat kutaraja-nya, berubah menjadi kantor bupati/walikota dengan perangkat unit-unit bawahannya. Sedangkan dalam konteks teknologi transportasi, juga terekspresi lampu-lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas di catuspatha.

Kata kunci: *catuspatha, crosroads, pempatan agung*

ABSTRACT

Catuspatha has a meaning not just a simple word "crossroad" but it means a crossroad which has a sacred value and a specific meaning and known as pempatan agung. At kingdom era, the catuspatha is as center of kingdom and this means that it is a center of country. While, since colonialism of the Netherlands in Bali, there are an idea to put aesthetic elements as focal point or city landmark at core of the catuspatha. Furthermore, this idea is obviously pursued by republic government on independent era.

The aim of the research is to explore evidently concept of the catuspatha, the transform of the concept and changes of the catuspatha as a kingdom center from the kingdom era till the republic era and its impact. This research have been conducted through surveying on nine catuspatha as heritage of the

kingdom era in Bali, collecting literatures, and interviewing the priest of siwa, budha, bujangga and other main actors as well.

The research shows that there are any critical changes of the catuspatha. Firstly, it is the change of idea or perspective of the catuspatha. The center of the catuspatha as an empty space has changed to be the aesthetic element of the city and even it has been operated as traffic sign and orientation. Secondly, regarding to political context, it has influence to the tradition values of the catuspatha. The symbolism of the kingdom authority which is expressed obviously on arrangement of palace with its facilities is changed as town hall and other offices. Thirdly, with regards to transportation technology, on the catuspatha, it is located traffic signs to manage and control the traffic flow.

Key words: *catuspatha, crossroads, pempatan agung*

PENDAHULUAN

Istilah *catuspatha* berasal dari bahasa Sanskerta *catus* yang artinya empat dan *patha* yang berarti jalan, sehingga bila dipadukan akan berarti jalan yang bercabang empat atau simpang empat. Di Bali, *catuspatha* diartikan bukan sekedar simpang empat atau *pempatan* tetapi suatu simpang empat (*crossroads*) yang memiliki nilai sakral dan makna tersendiri dan disepadankan dengan *pempatan agung*. Dengan demikian setiap simpang empat di Bali adalah *pempatan*, namun tidak seluruh *pempatan* merupakan *pempatan agung*. Di zaman kerajaan di Bali *catuspatha* bukan sekedar simpang empat yang sakral tetapi terkait pula dengan statusnya sebagai pusat ibukota kerajaan. Sebagai pusat ibukota, dan ibukota adalah pusat wilayah negara, maka *catuspatha* adalah pusat negara. Negara dalam budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu adalah suatu kosmos kecil yang merupakan replika atau miniatur alam raya (*makrokosmos*). Dalam kedudukannya sebagai pusat negara, maka *catuspatha* mengandung unsur-unsur: *puri* sebagai keraton atau pusat pemerintahan merangkap sebagai rumah jabatan; pasar sebagai pusat perdagangan/tempat transaksi; bangunan *wantilan* sebagai pusat budaya/hiburan khususnya sabungan ayam (*tajen*); dan ruang terbuka umum yang digunakan untuk taman rekreasi yang kadang-kadang ada yang dilengkapi dengan satu bangunan terbuka yang panjang (*bale lantang*).

Hasil studi tentang Kekuasaan dan Transformasi Arsitektur (Putra,1988) menunjukkan bahwa tidak seluruh pusat ibukota kerajaan memiliki keempat fasilitas pusat kota

seperti tersebut di atas. Hal ini berkaitan dengan status kekuasaan dari penguasa yang tinggal di suatu *puri* dalam kawasan suatu *catuspatha* sebagai pusat kota. Ada *catuspatha* sebagai pusat *kutaraja* suatu negara dan ada *catuspatha* yang merupakan pusat pemerintahan wilayah bawahan negara, dan ada *catuspatha* desa. Dengan demikian ada korelasi antara tipe *catuspatha* dengan status kekuasaan pimpinan wilayah yang menempati *puri* sebagai salah satu elemen dalam *catuspatha*.

Setelah Bali ditaklukkan oleh laskar Majapahit pada tahun 1343, maka para pimpinan pasukan Majapahit beserta prajuritnya hampir seluruhnya menetap di Bali untuk menjaga stabilitas keamanan dan selanjutnya mendukung pemerintahan Dalem Sri Kresna Kepakisan selaku Adipati Pemerintahan Majapahit untuk Wilayah Bali (Mirsha dkk., 1986:119-123). Sejak saat itu banyak dibangun *puri* atau keraton yang umumnya berlokasi di salah satu sudut suatu *catuspatha* di wilayah-wilayah *kadipaten* Bali. Pembangunan fasilitas kerajaan di *catuspatha* bertambah mantap sebagai atribut kekuasaan setelah wilayah-wilayah bawahan *Kadipaten* Bali melepaskan diri dari kekuasaan Gelgel dan berdiri sebagai negara-negara kecil yang berdaulat.

Puri sebagai fasilitas pusat kekuasaan pemerintahan ditemukan mengambil posisi di bagian timur laut, di barat daya, dan di barat laut pusat *catuspatha*. Sejak pendudukan Belanda di negara-negara di Bali, ada kecenderungan untuk menempatkan elemen-elemen estetika sebagai *focal point* atau *landmark* suatu kota pada pusat suatu *catuspatha* dan kecenderungan ini

dilanjutkan oleh pemerintah republik pada masa kemerdekaan, seperti terlihat pada saat ini adanya patung empat muka (*catur muka*) di tengah *catuspatha* Kota Denpasar, patung *kanda pat sari* di tengah *catuspatha* Kota Semarang, patung empat naga dengan lonceng di *catuspatha* Singaraja, dan patung wayang di *catuspatha* Negara. Dalam pembangunan pusat-pusat pemerintahan (*civic center*) kabupaten yang baru di Bali masih tersirat upaya untuk mempertahankan penempatan kantor bupati dalam kerangka pola *catuspatha* baik dalam *catuspatha* merupakan warisan ataupun di kawasan pusat pemerintahan yang baru dibangun, namun fasilitas-fasilitas pusat *kutaraja* sudah tidak diterapkan secara utuh.

Penelitian dan tulisan khusus yang mengungkap tentang *catuspatha* di Bali masih sangat terbatas. Beberapa informasi mengenai konsep *catuspatha* ditemukan dalam *Lontar Eka Pratamaning Brahmana Sakti Bujangga* dan *Lontar Batur Kelawasan* sedangkan eksistensi *catuspatha* pada masa lalu di Bali dijumpai antara lain dalam *Gegevens Betreffende De Zelfstandige Rijkjes op Bali* (1906), Tan (1966), Geertz (1980), Dumarcaay (1991), Pemda Badung (1992), Putra Agung (1996), Putra (1998), Nordholt (1996), Sugihantara (1996), Donder (2001), dan Widiastuti (2002). Pola *catuspatha* sebagai tata ruang pusat kerajaan telah digunakan pada masa Kerajaan Majapahit di Jawa dalam abad ke-14 (Dumarcaay, 1991:112).

Sebagai bahan penyusunan tulisan ini, telah dilakukan observasi terhadap 9 (sembilan) *catuspatha* warisan masa kerajaan di wilayah Bali. Untuk kondisi masa lampau dilakukan penelitian dokumen dan juga rekonstruksi melalui wawancara analisis di lapangan. Untuk melengkapi bahan-bahan berupa konsep, dilakukan wawancara terhadap nara sumber yang relevan, terdiri atas para *sulinggih* dari unsur-unsur *pendeta siwa*, *budha*, *bujangga*, dan unsur lainnya. Di samping sumber-sumber tersebut dilakukan pula penelahan tekstual berupa literatur, hasil penelitian, dan babad.

Pada bab-bab berikut akan dibahas tentang konsep *catuspatha*; transformasi konsep;

perubahan-perubahan ekspresi *catuspatha* pusat kerajaan dari masa kerajaan ke masa republik; dan dan dampak perubahan.

KONSEP CATUSPATHA

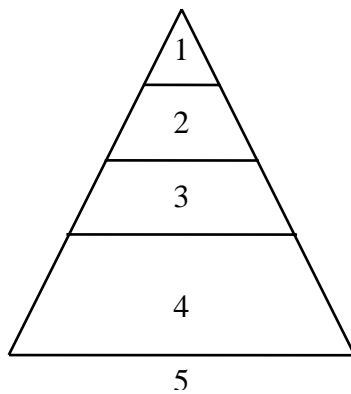
Heine-Geldern dalam *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara* menggambarkan tentang bagaimana seorang raja menempatkan dirinya setara dengan kedudukan para dewa penguasa jagad atau penguasa sorga yang berkedudukan di gunung (*meru*) sebagai pusat jagad. Raja dalam membangun kota termasuk istana raja di dalamnya merupakan replika dari jagad raya dengan simbol-simbol gunung (*meru*) tampil dalam istana atau tempat pemujaan negara yang ada di pusat kerajaan. Raja di dalamnya berperan sebagai dewa penguasa jagad kecil, kerajaan (Heine-Geldern, 1982:2-6). Nilai-nilai budaya dan konsepsi ini berlanjut pada masa kerajaan Majapahit di Jawa dan kemudian merambah Bali.

Raja sebagai puncak hirarki kekuasaan tercermin dalam kompleks keraton sebagai pusat kerajaan. Di Kerajaan Majapahit maupun perpanjangan kekuasaannya di Bali, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, *pempatan agung* (yang sakral) merupakan pusat ibukota kerajaan. Dalam kompleks pusat pemerintahan, di samping terdapat keraton sebagai pusat kekuasaan dan tempat tinggal raja, juga terdapat rumah-rumah pejabat teras pusat seperti para patih, para pendeta kerajaan, fasilitas-fasilitas peradilan, dan peribadatan (Hall, 1996: 98-99).

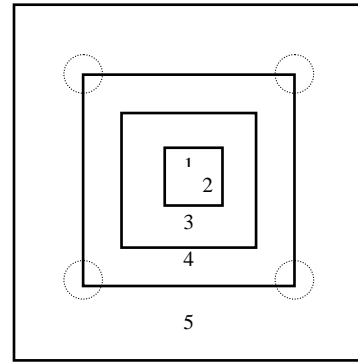
Pada masa Majapahit, Pendeta Waisnawa menggelar persembahan *tawur*, mendahului upacara keagamaan (ritual); upacara yang berkaitan dengan siklus pertanian ditonjolkan bagi intervensi Dewa Wisnu (*Sedana*, *Sadhana*, dan khususnya pasangannya Sri) untuk menjaga dan menghindari kekuatan-kekuatan negatif dunia niskala. Bagi orang Jawa melaksanakan persembahan *caru* nasi yang digelar di tanah mendahului suatu upacara merupakan kebiasaan dalam rangka untuk memuaskan (*nyomya*) mahluk-mahluk dunia

bawah agar tidak mengganggu jalannya upacara (Hall,1996:105). Hal serupa juga berlaku di Bali

Dalam rangka membangun kerajaannya yang baru, Sultan Hamengku Buwono I menyusun sistem fisik wilayah tempat tinggal yang secara berhati-hati mencerminkan struktur sosial yang menyentuh kekuasaan negara. Dalam konsep sosial negara, raja adalah pusat dan satu-satunya sumber kekuatan, diperkuat oleh kerabatnya yang bersama-sama mengangkat kebangsawanannya. *Abdi dalem* keraton, direkrut dari keluarga jauh raja atau dari rakyat jelata untuk melayaninya di istana. Masalah-masalah negara yang tidak mempengaruhi raja secara perseorangan, dipercayakan secara penuh kepada *pepatih dalem* yang umumnya di rekrut dari keluarga bangsawan dan dibantu oleh para *nayaka* atau menteri-menteri dengan seorang staf *abdi dalem* kerajaan yang berbeda dengan *abdi dalem* keraton. Dalam rangka untuk memastikan dan memperkuat struktur sosial, ditata suatu sistem wilayah perumahan kosentris dimana keraton ditempatkan di pusat, dikelilingi oleh kota bertembok dimana hampir seluruh bangsawan dan *abdi dalem*, kecuali bukan orang Jawa, dimukimkan (Soemardjan, 1978:222-223).



Lapisan Sosial Vertikal dengan Sultan di Puncak Sistem



Sistem Konsentrasi Wilayah Pemukiman dengan Sultan di Pusat Sistem

Keterangan:

- 1.Sultan; 2. Bangsawan inti di keraton; 3. Bangsawan di kota bertembok; 4. Komunitas kota di Kota Yogyakarta dengan desa *muetihan* di empat sudut; 5. Penduduk pedesaan di pinggiran negeri

Gambar 1. Diagram Lapisan Sosial Vertikal Dikaitkan dengan Sistem Wilayah

Konsep tentang negara dan tata letak suatu *puri* dalam *catuspatha* di Bali tertuang dalam *Lontar Eka Pretamaning Brahmana Sakti Bujangga*. Dalam prasasti ini disebutkan sebagai berikut.

“Yan kita anangun tata negara, wnanng awruha ikanang patemoning rasa, apan kita dadya metu ikang patemoning bhuana rho maka ingaranan bhuana agung lan bhuana alit, ika maka pawetuan idep maka palingganya angawe kakertaning jagat, apan meawak bayu, angeka bhuana, anglebur sehananing leteh, ika kramanya Brahmana Bujangga pinaka guruning ikang guru ri sekala..... Iti tataning ngawe tata negara maka umahing rat, luihnya; ikang bhuana metu saking idepta, apan idep maka patemoning rasa dadya metu catur lokapala ri akasa, yan mijil ri bhuana sekala dadya bhumi nyatur ingaranan catur negara... Urip lan pati maka pawedalan lemah lan wengi ika ngaran purwa lan pascima, patemoning rasa maka utama lan nista maka ngaran utara lan daksina. Yan maka catur nunggal dadya ngaran bhumi tunggal

maka palingganing angawe tataning tatanegara yan samangkana metu ikang **catuspatha**. Patemoning catuspatha ngaran raksa bhuana maka pangider-idering ikang negara ika payoganing ikang negara maka tataning linggih sang amudra bhumi”

Artinya:

Di dalam membangun tata negara, perlu ada perpaduan rasa, karena hal itu merupakan perpaduan dua dunia/alam yaitu mikrokosmos dan makrokosmos (*bhuana alit* dan *bhuana agung*), yang diwujudkan melalui pikiran sebagai inspirasi di dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keserasian alam. Tugas *Brahmana Bujangga*, guru dari semua guru di alam nyata, adalah untuk mewujudkan tenaga, menyatukan alam, dan mewujudkan kesucian. Untuk menata kerajaan sebagai tempat tinggal rakyat, pertama-tama perlu memahami asal mula pembentukan alam. Alam itu terbentuk dari pemikiran yang merupakan perwujudan rasa. Dalam alam ditentukan empat arah mata angin (*caturlokapala*) yang kemudian diejawantahkan menjadi *catur negara*. Hidup dan mati merupakan perwujudan siang dan malam yang diartikan pula sebagai arah timur dan barat. Perpaduan rasa yang merupakan perwujudan nilai *utama* (tertinggi) dan *nista* (terendah) diejawantahkan dengan arah utara dan selatan. Bila keempatnya ditemukan menjadi simbol bumi bulat dan diwujudkan dengan pola *catuspatha* (*pempatan agung*). Pusat *catuspatha* merupakan pusat dunia dan juga pusat negara. Dari sinilah menentukan letak *puri* seorang kepala negara.

Dengan demikian maka *pempatan agung* atau *catuspatha* merupakan simbol pusat dunia. Letak *puri* sebagai pusat kekuasaan ditentukan menurut arah mata angin dari pusat *catuspatha* ini, bukan didasarkan kepada kiblat gunung-laut (*kaja-kelod*) sebagai arah orientasi *utama-nista*. Nilai-nilai masing-masing sudut untuk perletakan *puri* menurut naskah ini adalah:

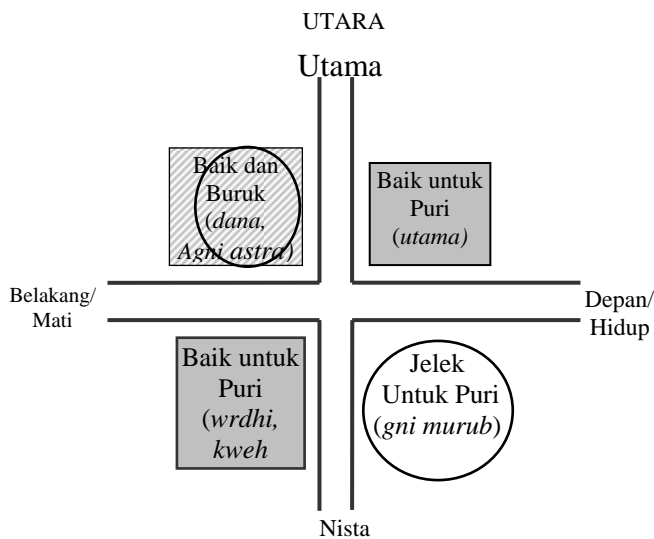
“Ersanya utamaning negara maka linggih ikang rat. Genyan pawetuan ikang gni rurub apan lebur ikang rat, tan wenang kangge. Neriti utama apan

wredhi ikang rat negara. Wayabya dahat kadurmanggalan apan gni astra payoganya”

Artinya:

“Timur laut tempat yang utama untuk *puri*. Tenggara perwujudan dari kobaran api yang menyebabkan hancurnya kerajaan, tidak baik untuk tempat *puri*. Barat daya, utama, karena mengakibatkan rakyat di dalam negara hidup sejahtera, makmur, berkembang, dan mewah. Barat laut berakibat buruk karena merupakan tempat *gni astra*”.

Dalam *Lontar Batur Kelawasan* disebutkan bahwa posisi *puri* di timur laut adalah utama, di tenggara adalah buruk karena negara akan hancur (*gni rurub*), di barat daya adalah baik karena raja akan dihormati (*kweh bakti*), dan di barat laut adalah baik karena raja akan bersifat sosial (*dana*). Dari dua sumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa letak *puri* ditentukan dari pusat *catuspatha*, di timur laut dan di barat daya mutlak baik, di tenggara mutlak buruk, dan di barat laut ada baik dan ada buruknya.



Gambar 2. Makna sumbu dan alternatif tata letak puri dalam *catuspatha* (*Lontar Eka Pretamaning Brahmana Sakti Bujanggadan dan Batur Kelawasan*)

Ruang yang terbentuk oleh pertemuan empat ruas jalan pembentuk *catuspatha* (*raksa*

bhuana) difungsikan untuk kegiatan-kegiatan upacara tawur, memutar usungan pada upacara *ngaben*, menjemput batara (*mendak siwi*), *nebusin*, dan kadang-kadang untuk melatih dan meningkatkan kemampuan ilmu hitam. Ruang ini juga diperankan sebagai *natar* (halaman) dan lebih desa/kota. Pembangunan *catuspatha* melalui suatu proses pensakralan yaitu dengan *bhumi suda* dan *pemlaspasan* yang disertai dengan penguburan sarana *pedagingan* (*pemendeman pedagingan*), sehingga terwujud suatu energi magis wilayah (negara). Di bagian *raksa bhuana* ini diyakini berstana (*melinggih*) roh/kekuatan alam dengan berbagai sebutan seperti *Sang Bhuta Prajapati (Kanda Pat)*, *Sanghyang Catur Bhuana (Tutur Gong Besi)*, dan *Sanghyang Adi Kala (Tattwa Japakala)*, yang kesemuanya merupakan wujud kekuatan ciptaan *Siwa Mahakala*.

Catuspatha memiliki bentuk dasar *palang (+)* dalam istilah Bali disebut juga dengan *tampak dara* yang mitologinya terdapat dalam *Lontar Catur Bumi*. Orang-orang Yunani Kuno menyebut *tampak dara* ini dengan istilah *gammadion*. *Tampak dara* ini mengilhami koordinat Cartesius dalam matematika dan menjadi dasar *swastika*. Bila *swastika* merupakan simbol perputaran alam semesta, maka *tampak dara* (sumbu salib) merupakan simbol alam semesta. *Tampak dara* ini juga digunakan sebagai penangkal untuk menghindari malapetaka (Donder, 2001:15-16).

TRANSFORMASI KONSEP CATUSPATHA

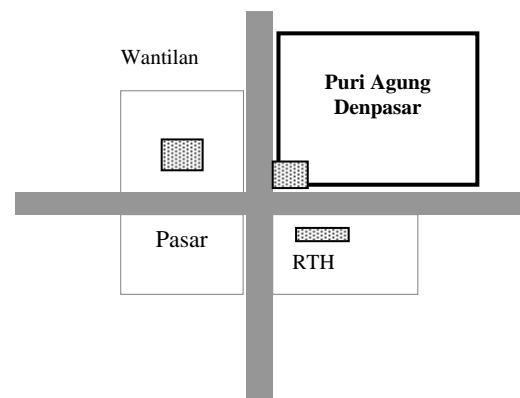
Penerapan konsep *catuspatha* pada masa kerajaan dapat dipandang sebagai penerapan yang paling taat dan disiplin dibandingkan dengan masa-masa selanjutnya. Pada masa kolonial tidak ada pembangunan *puri* baru sebagai kedudukan pemegang kekuasaan pemerintahan wilayah, demikian pula pada masa kemerdekaan. Bila pola *catuspatha* yang merupakan warisan budaya luhur yang perlu dilestarikan sebagai kerangka tata ruang pusat pemerintahan di masa kemerdekaan, maka kantor pemerintahan (gubernur/bupati/walikota) dapat dianalogikan sebagai "*puri*" untuk pelaksanaan pemerintahan. Berikut akan dibahas tentang transformasi konsep *catuspatha* pada masa

kerajaan dan transformasinya pada tata ruang pusat pemerintahan di masa republik.

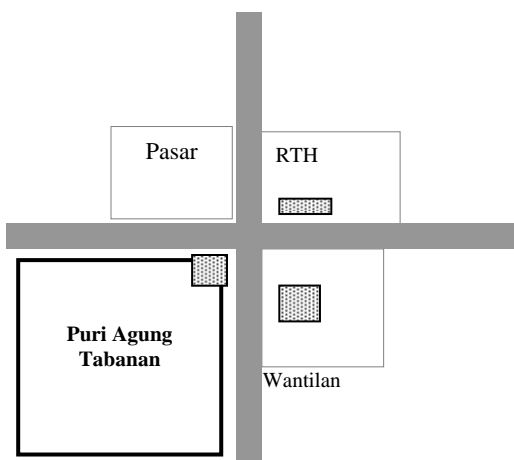
1. Transformasi Konsep Catuspatha dalam Tata Ruang Pusat Kerajaan

Dari 9 *catuspatha* negara kerajaan di Bali, empat *puri agung* (untuk raja) diletakkan di timur laut (Denpasar, Gianyar, Negara, Karangasem), empat *puri agung* diletakkan di barat daya (Tabanan, Semarapura, Singaraja, dan Mengwi), dan satu *puri agung* diletakkan di barat laut *catuspatha* (*Puri Agung Bangli*). Saat ini, masa kemerdekaan, terdapat sembilan *catuspatha* warisan masa kerajaan, empat di antaranya (Tabanan, Mengwi, Gianyar, dan Karangasem) pusatnya dibiarkan dalam keadaan kosong, tanpa dibangun elemen-elemen estetika ataupun elemen sebagai *landmark* atau *focal point*, dan lima lainnya dibangun patung, *tugu* atau yang sejenisnya (Denpasar, Negara, Singaraja, Bangli, Semarapura).

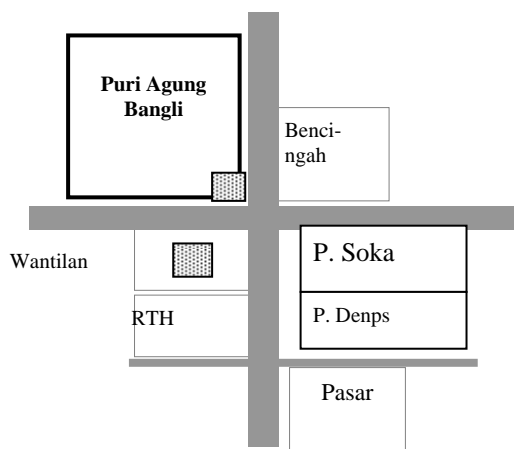
Di samping adanya *puri* di salah satu sudut *catuspatha*, juga ada fasilitas lainnya seperti pasar, *wantilan*, dan ruang terbuka hijau yang kadang-kadang dilengkapi dengan suatu bangunan terbuka yang relatif panjang (*bale lantang*). Bagian *puri* yang berada di dekat pusat *catuspatha* adalah pelataran (*palebahan*) *ancak saji* yang di sudut terluarnya terdapat *bale bengong* (*bale tajuk*). Pelataran *ancak saji* di dua sisi yang berbatasan dengan jalan menggunakan tembok kerawang dengan dua sampai tiga pasang *candi bentar*.



Gambar 3. *Catuspatha* dengan Puri Agung Denpasar di Timur Laut.



Gambar 4. *Catuspatha* dengan Puri Agung Tabanan di Barat Daya.



Gambar 5. *Catuspatha* dengan Puri Agung Bangli di barat laut.

2. *Catuspatha* dalam Pusat Pemerintahan Republik

Pada masa kekuasaan Belanda di Bali, sejak 1 Juli tahun 1938, dibentuk pola pemerintahan *swapraja* setingkat kabupaten sekarang, yang disebut dengan *zelfbestuurende landschappen* yang dikepalai oleh seorang *zelfbestuurder* atau kepala daerah *swapraja*. Kepala-kepala daerah ini merupakan “raja-raja” kecil yang memerintah di bawah pengawasan seorang kontrolir Belanda (Agung, 1989:677). Ketika Indonesia merdeka, maka kedelapan *zelfbestuurende landschappen* menjadi daerah *swapraja* tingkat dua, yang kemudian berubah menjadi kabupaten.

Pada masa kemerdekaan, dibangun pula kantor-kantor bupati yang mengambil posisi di suatu *Civic Centre* Kabupaten (CCK). Pusat CCK ini menunjukkan kecenderungan masih menggunakan pola *catuspatha* sebagai pusat tata ruang ibukota kabupaten baik dalam *catuspatha* baru (Jembrana, Tabanan, Badung di CCK. Lumintang, Gianyar, dan Bangli), maupun yang merupakan peninggalan zaman kerajaan (Kota Denpasar, Semarapura, dan Bangli sebelum pindah ke CCK yang baru). Tetapi, Kantor Bupati Karangasem, Kantor Bupati Buleleng, Kantor Gubernur Bali, dan Kantor Bupati Badung (yang masih dalam rencana di Sempidi) tidak menggunakan bingkai pola *catuspatha*. Kantor Bupati Karangasem dan Kantor Gubernur Bali ditempatkan pada pola alun-alun sebagai pusat orientasi, Kantor Bupati Buleleng ditempatkan pada ujung sumbu/jalan utama, dan Kantor Bupati Badung (rencana) ditempatkan pada zone *madya mandala* dalam pola *trimandala*.

Catuspatha baru di pusat pemerintahan Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung di Lumintang, tetap membiarkan pusatnya sebagai ruang kosong. Penempatan Kantor Bupati Badung dan Jembrana sebagai pusat pemerintahan kabupaten mengambil posisi di timur laut sesuai dengan norma tradisi. Namun, fasilitas kota lainnya yang umumnya secara tradisi terdapat di kawasan *catuspatha* tidak diterapkan secara utuh. *Catuspatha* Kantor Bupati Jembrana memiliki taman namun tidak memiliki fasilitas hiburan dan pasar. *Catuspatha* Kantor Bupati Tabanan, menempatkan posisi kantor bupati di daerah tenggara yang secara tradisi bernilai buruk bagi *jagad* Tabanan, bahkan tiga fasilitas pusat pemerintahan kerajaan tidak terdapat dalam kawasan *catuspatha*. Fasilitas yang ada terdiri atas rumah sakit di sudut timur laut, Pura Dalem di barat daya, dan pertokoan di sudut barat laut. *Catuspatha* Kantor Bupati Badung (yang dibakar masa) menempatkan kantor Bupati di sudut timur laut, pada daerah yang baik secara tradisi, dan telah menempatkan *wantilan* dan taman secara benar menurut tradisi. Namun fasilitas pasar tidak muncul, tetapi digantikan dengan Gedung DPRD. di barat laut pusat *catuspatha*. Di Gianyar, kantor bupati masih belum dapat dikatakan

berada di dalam bingkai *catuspatha* karena ada fungsi-fungsi lain (sekolah dan bank) yang berada pada sudut *catuspatha*.

PERUBAHAN EKSPRESI CATUSPATHA

Catuspatha yang pola bentuknya seperti tergambar di atas telah bertahan berabad-abad pada masa kerajaan di Bali, namun setelah intervensi Belanda di Bali maka mulai dilakukan perubahan di areal *catuspatha*, terutama di bagian pusat *catuspatha*, dengan dibangunnya lonceng atau elemen-elemen estetika yang berperan rangkap sebagai tanda pengenal orientasi. Contoh kasus ini adalah pembangunan lonceng di pusat *catuspatha* Puri Denpasar, dan lonceng di *catuspatha* Puri Gede Singaraja. Di sekitar pusat *catuspatha* juga terjadi perubahan-perubahan fungsi dan bangunan sesuai dengan kepentingan pemerintahan Belanda.

Pada masa kemerdekaan, perubahan ekspresi menjadi semakin marak, meluas ke hampir setiap kabupaten/kota dengan dibangunnya patung-patung ataupun tugu yang bernafaskan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu, kecuali *catuspatha* Puri Gianyar, Tabanan, dan Puri Gde Karangasem yang masih tetap kosong di pusatnya. Di Denpasar terjadi perubahan elemen dari lonceng zaman Belanda menjadi Patung Empat Muka. Di Bangli terjadi perubahan dari kosong menjadi Patung Caturmuka yang kemudian dirubah menjadi *Trimurti*. Di Klungkung dari kosong menjadi *pelinggih* kemudian menjadi Patung *Kandapat Sari*. Di Tabanan, sejak masa kolonial Belanda *catuspatha* sempat bergeser tempat sejauh 150 m kearah selatan dan pada masa kemerdekaan dibangun semacam tugu. Sedangkan di Mengwi, dari kosong sempat dibangun tugu, kemudian dikosongkan lagi menjelang palebon pengelingsir Puri Mengwi.

Dengan adanya perubahan sistem kekuasaan, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana transformasi, dan pola aktivitas penduduk, maka pola bentuk dan dimensi *catuspatha* mengalami perubahan. Fasilitas-fasilitas tradisional juga mengalami perubahan seperti *wantilan* berubah menjadi fasilitas lain seperti perkantoran, taman rekreasi, dan

monumen. Ruang terbuka umum berubah menjadi alun-alun. Pasar berubah menjadi sasana budaya, perkanrtoran dan lain-lainnya.

Dalam perjalanan waktu dan perputaran dunia, elemen-elemen material ciptaan Tuhan baik yang terekam oleh indra manusia (*sekala*) maupun yang tidak terekam (*niskala*) kemungkinan besar mengalami “kekotoran” sehingga perlu disucikan dan diberikan korban untuk mengeliminir atau menekan bangkitnya kekuatan jahat yang negatif sehingga kembali terjadi keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Untuk maksud tersebut dilakukan *yadnya* secara periodik setiap tahun pada bulan mati *sasih kesanga* yaitu pada hari *pengerupukan* dalam bentuk upacara *tawur* yang disebut dengan *tawur kesanga*. (Wikarman, 1998:17).

DAMPAK PERUBAHAN

Pembangunan struktur dalam bentuk apapun di tengah-tengah *catuspatha* memberi dampak positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan lonceng memberikan peringatan kepada masyarakat akan waktu dan sekaligus juga dapat dipandang sebagai pusat perhatian dan juga pusat orientasi. Belanda dengan sangat cerdas berhasil membangun citra dan membenaran dengan mengejawantahkan *Sanghyang Adi Kala* ke bentuk lonceng (*kala*) besar (*adi*) di balik kemungkinan agenda tersembunyinya untuk menyumbat/melumpuhkan pusat energi magis negara. Pembangunan patung-patung yang bernuansa budaya Bali seperti patung dewa, *rsi*, tokoh pewayangan, dan raksasa dapat meningkatkan estetika kota dan mendukung kota berwawasan budaya. Pembangunan marka/pulau-pulau di tengah *catuspatha* dapat membantu pengamanan lalu-lintas. Pembangunan patung-patung pahlawan seperti di Kota Denpasar dapat dipakai sebagai elemen untuk mengenang kepahlawanan dan untuk pemeliharaan semangat anti kolonialisme. Dampak negatif pembangunan struktur di tengah-tengah *catuspatha* adalah terjadinya distorsi penempatan sarana dan pelaksanaan prosesi upacara keagamaan yang menggunakan media *catuspatha* bahkan dapat menggeser pelaksanaan kegiatan upacara *tawur kesanga* ke tempat lain seperti alun-alun atau

catuspatha yang baru. Peluang untuk memutar *bade* secara rotasi (berputar pada sumbunya) tidak dapat dilakukan dan harus berkeliling di sekitar sruktur yang ada di tengah *catuspatha*.

SIMPULAN

Dalam sistem ide terjadi perubahan gagasan dimana pandangan tentang pusat *catuspatha* yang kosong berubah menjadi elemen estetika kota, disamping berperan sebagai rambu-rambu lalu lintas juga sebagai orientasi. Gagasan penempatan elemen-elemen sebagai ekspresi simbolis dewa-dewa penjaga kota yang berada di batas-batas kota/pemukiman dalam segala penjuru mata angin berubah ke pola Barat dengan penempatan elemen estetika di pusat *catuspatha*. Penempatan elemen estetika di pusat *catuspatha* berdampak terhadap pelaksanaan upacara keagamaan yang semestinya secara tradisi mengambil tempat di *catuspatha*, terpaksa digeser ke tempat lain. Simbol-simbol baru yang terbentuk seperti patung empat muka, tugu, patung *kandapat sari* masih kurang dapat dipahami secara menyeluruh oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks politik terjadi perubahan dari negara kerajaan yang aristokratis ke negara republik yang demokratis di mana negara-negara dalam kelompok *astanegara* (delapan negara) di Bali berubah menjadi kabupaten dan setelah pembentukan Daerah Kota Madya Denpasar (sekarang Kota Denpasar) maka terdapat sembilan wilayah kabupaten/kota. Simbol-simbol kekuasaan kerajaan yang terekspresi dalam tatanan *puri* dengan fasilitas pusat *kutaraja*-nya, berubah menjadi kantor bupati/walikota dengan perangkat unit-unit bawahannya. Perubahan ini memberikan dampak terhadap keutuhan nilai-nilai tradisi dalam *catuspatha*.

Dalam konteks teknologi transportasi, penggunaan kendaraan bermotor memerlukan persyaratan jalan dan persyaratan lalu lintas yang lain dibandingkan dengan ketika mayoritas penduduk hanya berjalan kaki dan sebagian kecil dengan menggunakan bantuan tenaga hewan. Beragam dan padatnya lalu lintas kendaraan dan manusia di kawasan *catuspatha* memberikan

dampak terhadap rasa aman pemakai jalan. *Traffic light* sebagai elemen teknologi dan adanya *zebra cross* yang digunakan membantu mengatur keamanan lalu lintas pada dasarnya dipahami oleh masyarakat, namun sering tidak ditaati sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Dalam konteks teknologi ini juga terekspresi lampu-lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas di simpang empat. Meningkatnya perekonomian penduduk, meningkat pula kepemilikan dan penggunaan kendaraan, sehingga memberi andil terhadap permasalahan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. A. A. G. 1989. *Bali Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anderson, B. R. O'G. 1992. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Belo, J. 1970. *Traditional Balinese Culture*. New York: Columbia University Press.
- Anonim. 1906. *Gegevens Betreffende de Zelfstandige Rijkjes op Bali*. Batavia: Lands-drukkerij.
- Budihardjo, E. 1995. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Covarrubias, M. 1956. *Bali: With an Album of Photographs by Rose Covarrubias*. New York: Alfred A. Knopf.
- Dumarcay, J. 1991. *The Palaces of South-east Asia: Architecture and Customs*. Terjemahan Michael Smithies. New York: Oxford University Press.
- Frick, H. 1988. *Arsitektur dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz, H. 1994. *Images of Power*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Hall, K R. 1996. "Ritual Networks and Royal Power in Majapahit Java". In *Archipel* 52. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Hal. 95-119.
- Heine-Geldern, R. 1982. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: CV Rajawali.

- Kaler, I G. K.. 1982. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Jilid 2. Denpasar: Bali Agung.
- Koentjaraningrat.1992. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaran Daerah Propinsi Dati I Bali. 1977. *Peraturan Daerah Propinsi Dati I Bali Tentang : Tata Ruang untuk Pembangunan, Lingkungan Khusus, dan Bangun-bangunan*. Denpasar: Pemda Tk I Bali.
- Lombard, D.. 1996. *Nusa Jawa : Silang Budaya. Kajian Sejarah Terpadu, Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mirsha, I G. N. R. dkk. 1986. *Sejarah Bali*. Denpasar: Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemda Tk I Bali.
- Moertono, S. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 148-170.
- Murya, A A P. dkk. 1992. *Babad Keluarga Besar Puri Agung Pemecutan*. Denpasar
- Nordholt, H. S. t.t. *Bali: Colonial Conceptions and Political Change 1700-1940, From Shifting Hierarchies to 'Fixed Order'*. Casp 15.
- 1996. *The Spell of Power: A History of Balinese Politics 1650-1940*. Leiden: KITLV Press.
- Pager, I G. N. (penyadur). Tanpa tahun. *Eka Pretamaning Brahmana Sakti Bujangga*. Tidak dipublikasi.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.1994. *Himpunan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I — XV*. Tidak dipublikasi.
- Putra Agung, A.A.G. 1996. *Peralihan Sistem Birokrasi Kerajaan Karangasem 1890-1938*. Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak dipublikasi.
- Putra, I G.M.1988. *Kekuasaan dan Transformasi Arsitektur: Suatu Tinjauan Budaya Terhadap Kasus Puri Agung Tabanan*. Tesis Magister Universitas Udayana.
- Salya, Y. 1975. *Spatial Concept in Balinese Traditional Architecture; Its Possibilities for Futher Development*. University of Hawaii Thesis, Honolulu. Tidak dipublikasi.
- Sidemen, I. B.. 1986. *Struktur Birokrasi dan Mobilitas Sosial di Kerajaan Gianyar 1856 - 1899*. Tesis S2. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak dipublikasi.
- Sidemen, I. B. dkk. 1992. *Sejarah Badung*. Denpasar: Pemda Tingkat II Badung.
- Singgin Wikarman, I N. 1998. *Caru : Pelemahan dan Sasih*. Surabaya: Paramita.
- Soebadio, H. and Carine A. du Marchie Sarvaas (ed.). 1978. *Dynamics of Indonesian History*. Amsterdam; New York: Oxford, North Holland Publishing Company.
- Soemardjan, S.. 1978. "The Keraton in The Javanese Social Structure". In Haryati Soebadio and Carine A. du Marchie Sarvaas (ed.), *Dynamics of Indonesian History*. Amsterdam; New York; Oxford: North Holland Publishing Company. pp. 222-223.
- Suamba, I. B. P.. 1995. *Agni Purana*. Denpasar: Upada Sastra
- Tan, R. Y. D.. 1967. *Description of the Domestic Architecture of South Bali*. M.A. Thesis Yale University, Yale. Dalam B.K.I. 123-4:pp. 442-475.
- Tim Penelitian Inventarisasi Pola-pola Arsitektur Tradisional Bali. 1979. *Arsitektur Tradisional Bali..* Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali. Tidak dipublikasi.
- Warna, I W. dkk (Penerjemah). 1986. *Babad Dalem, Teks dan Terjemahan*. Denpasar: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Tidak dipublikasi.
- Wertheim, W.F. cs. (editors). 1960. *Bali: Stdies in Life, Thought, and Ritual*. Slected Studies on Indonesia, Vol. V. Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd.
- Wiener, M. J. 1995. *Visible and Invisible Realms: Power, Magic, and Conquest in Bali*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Yamin, H. M.. t.t. *Tatanegara Majapahit*. Parwa I. Tanpa penerbit.
- Yuda Triguna, I B. G. 2000. *Teori Tentang Simbol*. Denpasar: Widya Dharma.